
 ULAMA DAN DAYAH DALAM NOMEGLATUR MASYRAKAT ACEH

Oleh

Mursyidin Ar-Rahmany

IAIN Langsa

E-mail: mursyidin.ar70@gmail.com**Abstract**

Ulama dalam masyarakat Aceh sebagai panutan yang menyatu dalam konteks keislaman. Pembentukan Ulama melalui dayah (pesantren), sehingga terbentuknya menjadi mujtahid dan pemangku pendidikan sekaligus implementator hukum. Ulama dan dayah bagaikan laut dan pantainya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sehingga menyatu dalam seluruh ruh kehidupan masyarakat Aceh. Eksistensi ulama sebagai pemimpin umat dan simbol pemersatu. Sebagai pemimpin informal alim ulama menjadi panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu berbagai problematika. Masyarakat merasa terlayani dengan petuah darinya yang diberikan, merubah konsep kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang Islami melalui pendidikan dayah. Seiring peruhan zaman, Ulamapun melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi yang diemban dalam pendidikan dayah memberantas kejahilan dalam masyarakat. Maka terbentuk ulama yang mengembangkan sayapnya sampai ke seluruh nusantara. Maka ulama Aceh merupahan muballigh ke seluruh pelosok Indonesia dan Asia tenggara, seperti Ke pulau Jawa, Banjar, Makasar, Semenanjung Malaka, Brunai Darusalam bahkan sampai ke Mindanau.

Keywords: Ulama, Dayah, Aceh**PENDAHULUAN**

Ulama merupakan tokoh sentral dalam kehidupan masyarakat di Aceh, karena mereka menjadi pelopor, pembentuk, pembina, pengayom dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek pendidikan, sosial dan kemasyarakatan, bahkan aspek politik dan ekonomi. Keberadaan ulama bagaikan lampu dalam masyarakat, yang memberikan input, baik menagani ideologi maupun teknologi. Karena itu, ulama mejadi sosok dan elemen terpenting dalam keberhasilan syariat Islam di Aceh.

Masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang agamis, khususnya Islam sangat dekat dengan

ulama. Disadari bahwa ulama dalam masyarakat menjadi sosok yang dihormati dan dikagumi, menjadi panutan pembimbing, pemberi petunjuk kepada jalan yang benar bagi segenap warga, sehingga masyarakat atau ummat menjadi orang yang lebih memahami dan terpelihara sikap dan ibadah serta sosial budayanya. Kekaguman masyarakat terhadap ulama terutama karena ulama memiliki pengetahuan agama yang mendalam serta ulama juga sebagai tokoh yang memiliki kharismatik dalam kehidupan masyarakat.

Ulama di Aceh sudah banyak diberi gelar sesuai dengan tingkat keilmuannya yaitu Teungku, Abon, Abu, dan Teungku Chiek.¹

¹Gelar teungku yang dijuluki kepada seseorang sebenarnya biasa-biasa saja. Sebutan ini juga sering digelarkan kepada seseorang yang telah dan sedang menempuh pendidikan di dayah (pesantren).Sebutan itu tidak memandang berapa lama seseorang belajar di suatu lembaga pendidikan dayah. Namun kalau ditinjau secara ilmiah, ulama yang dimaksud adalah mereka selain memiliki pengetahuan agama yang dalam dan luas juga

memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Seorang ulama beriman, bertaqwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, serta selalu mengajak umat manusia untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-Nya. Umumnya mereka adalah pimpinan-pimpinan dayah/pesantren, walaupun ada pula yang tidak memimpin dayah. Keulamaan seseorang

Kepopuleran seorang ulama bukan saja karena kesalahannya dan berilmu tinggi, akan tetapi karena sanggup memimpin masyarakat. Sosok ulama adalah simbol pemersatu umat. Sebagai pemersatu umat, pada diri ulama itu terpancar sifat kharismatik. Kharisma atau kewibawaan yang dimiliki oleh seseorang ulama menjadi satu kekuatan yang mampu menggerakkan dan memotivasi rakyat dalam melakukan berbagai aktivitas positif sehari-hari.

ULAMA DAN DAYAH

Ulama sangat edentik dengan dayah. Dayah² adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang sudah lama berkembang di Aceh.³ Ulama dan dayah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan kehidupan sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Secara historis, dayah tidak diketahui kapan sebenarnya Dayah masuk ke Aceh secara pasti. Namun, A. Hasyimi seorang Sejarawan Aceh, berpendapat bahwa Dayah masuk ke Aceh sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Peureulak pada Muharram 225 H/840 M.⁴ Jika merujuk pada hasil seminar tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara yang

dilaksanakan di Rantau Peureulak pada tanggal 25-30 September 1980,⁵ menyatakan bahwa tahun berdirinya Kerajaan Islam Peureulak sebagai Kerajaan Islam tertua, maka Dayah Cot Kala merupakan Dayah pertama di Aceh bahkan di Asia Tenggara. Setelah lahirnya Dayah Cot Kala, maka sesuai dengan tujuan pendirian dayah sendiri, yaitu untuk mencetak kader ulama sebagai petunjuk ummat, Dayah Cot Kala itu telah melahirkan para sarjananya yang dapat menyebarkan Islam ke seluruh Aceh sehingga lahirlah Dayah-dayah baru seperti Dayah Serele di bawah Pimpinan Tengku Syekh Sirajuddin yang didirikan pada tahun 1012 sampai dengan 1059 M, Dayah Blang Priya yang dipimpin oleh Tengku Ja'kob yang didirikan antara tahun 1155-1233 M, Dayah Batu Karang di Kerajaan Tamiang yang dipimpin oleh Tengku Ampon Tuan, Dayah Lam Keuneuen dari Kerajaan Lamuria Islam di bawah pimpinan Tengku Syekh Abdullah Kan'an yang didirikan antara 1196 sampai dengan 1225 M. Dayah Tanoeh Abee antara Tahun 1823-1836 M dan Dayah Tiro di Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie antara tahun 1781-1795 M, dan dayah-dayah lainnya yang tersebar di seluruh Aceh di kala itu.

pimpinan dayah itu sering juga digelar dengan sebutan, Abon, Abu, dan Teungku Chiek.

²Istilah *dayah* berasal dari kata *zawiyah* yang berarti sudut atau pojok dalam bahasa Arab. Sebagai suatu institusi pendidikan, *zawiyah* yang berubah menjadi *dayah*, memang berasal dari pengajian-pengajian yang diadakan disudut-sudut masjid yang merupakan institusi pendidikan yang sangat awal dalam Islam. Lihat Safwan Idris, "Mengemban Amanah Allah: Reaktualisasi Syariat Islam dan Masa Depan Pendidikan di Aceh", dalam buku Fairus M. Nur Ibr, (ed.), *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002), hal. 12-13.

³Lembaga pendidikan yang diistilahkan dayah dari istilah *zawiyah*. Perubahan menjadi Dayah, seperti halnya perubahan istilah Madrasah menjadi Meunasah. Pada era Islam pertama masuk ke Nusantara yaitu masa Kerajaan Peureulak telah dikenal tempat yang yaitu Cut kala, kemudian didirikan sebuah pondok/dayah yang kemudian menjadi Zawiyah Cot Kala, tempat inilah yang

merupakan lembaga Pendidikan Agama pertama di Nusantara di dirikan abat ke 10.

⁴Berdasarkan lembaran-lembaran lepas dari naskah tua *Izdharul Haq Fil MamlakatilPeureulak*, karangan Syeh Ishak Makarani Al-Pasi dan naskah *Tajzirat Thabaqat Jam'u Salatin*, kerajaan Islam Peureulak didirikan pada tahun 225 H (840 M) dengan rajanya yang pertama adalah sultan Alaidin Saiyidi Maulana Abdul Aziz Syah, kemudian Tgk Muhammad Amin Pendiri Dayah Cot Kala juga menjabat sebagai Sultan Peureulak yang keenam yang bergelar *Makdum Alaidin Malik Muhammdah Amin Syah Johan Berdaulat*. Ini menunjukkan bahwa Dayah Cot Kala didirikan setidaknya pada awal abad ke 10 M dengan pimpinan Tengku Muhammad Amin Syah Johan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 15

⁵Lihat A. Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 67.

Perkembangan Dayah juga dilakukan pada masa kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam (Abad ke 18 dan ke 19 M). Dayah yang dibangun pada masa tersebut adalah Dayah Tgk Syik Kuta Karang, Dayah Lam Birah, Dayah Lamnyong, Dayah Lambhuk, Dayah Krueng Rumpet, mengenai tahun pendirian dayah tersebut belum didapat data yang pasti.

Sejak abad IX Masehi, Kerajaan Islam Pereulak, Keberadaan Dayah di Aceh telah ada bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh pada akhir masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab. Beberapa Dayah yang berkembang saat itu termasuk Dayah Cot Kala, Dayah Kuta Karang, Dar as-syariah Mesjid Raya, namun semua Dayah ini telah diobrak-abrik Belanda. Pada abad 5 Hijriah, Mesir menemukan kapal buatan Aceh yang terdampar di Laut Tengah. Pada masa Iskandar Muda, sebuah kapal Spanyol rusak di perairan Sabang, kemudian diderek ke pantai dengan gajah dan diperbaiki oleh santri-santri dayah Dar as-syariah.

Dayah merupakan sebuah lembaga yang dikenal dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, sehingga dayah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi pilihan favorit dalam masyarakat Aceh. Sejak Islam masuk ke Aceh, pendidikan dayah merupakan pendidikan formal, dengan menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Aceh dan tulisannya memiliki resam tulisan Arab Jawi.

Institusi pendidikan tinggi Islam yang merupakan lanjutan dari institusi pendidikan *rangkang*. Hampir pada tiap-tiap daerah di Aceh berdiri *dayah*. Kadang-kadang ada *dayah* yang berpusat di masjid bersama dengan institusi pendidikan *Rangkang*, tetapi

kebanyakan *Dayah* berdiri sendiri di luar lingkungan masjid, dengan menyediakan Balai Utama sebagai aula, yang digunakan menjadi tempat belajar dan sembahyang berjama'ah.⁶

Mayoritas alumni dayah menjadi ulama dan tokoh masyarakat ketika mereka kembali ke kampung halamannya. Hal ini menunjukkan bahwa dayah memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan dan sosial kemasyarakatan.⁷

Sebelum kedatangan Belanda, dayah sering dikunjungi oleh orang-orang dari luar Aceh. Seperti: Daud al-Fattani dari Pattani⁸ yang kemudian dikenal sebagai ulama terkemuka dan penulis yang terkenal serta guru yang dihormati oleh murid-murid muslim Asia Tenggara di Mekkah. Dia pernah mengunjungi Aceh pada tahun 1670-an dan belajar selama dua tahun dengan *Muhammad Zain al-Faqih al-Jalal al-Din al-Ashi*. Muhammad Zain al-Faqih adalah salah seorang pemimpin dayah di Aceh dan penulis dua kitab yang sangat terkenal, yaitu *Kasyf al-Kiram fi Bayan al-Niyat fi Takbirat al-Ihram* dan *Talkhis al-Falah fi Bayan al-Talaq wa al-Nikah*.⁹

Setelah Indonesia Merdeka, dayah tetap menjadi pilihan bagi masyarakat Aceh, namun lambat laun pendidikan dayah sudah menjadi pudar, lebih-lebih pada masa Orde Baru, dimana ulama dan dayah dipandang sebelah mata oleh penguasa/pemerintah, sementara alumni-alumni dayah menjadi pembina dan pendukung program-program pemerintah dalam membina membangun masyarakat seutuhnya. Demikian juga alumni dayah yang menjadi kaki tangan pemerintah, dapat

⁶*Ibid.*,

⁷Misnawati, *Pengaruh Manajemen Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh Timur terhadap Pendidikan Masyarakat*, dalam *Dinamika Studi Keislaman: Konseptualisasi dan Aktualisasi Islam dalam Pelataran Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, (Langsa: STAIN Zawiyah Cot kala Langsa, 2011), Cet.1, hlm. 138.

⁸Pattani adalah suatu wilayah yang terdapat di negara Thailand dan penduduknya mayoritas beragama Islam.

⁹M. Hasbi Amiruddin, *The Response of The 'Ulama' Dayah to The Modernization of Islamic Law in Aceh*, (Disertasi Master: Institute of Islamic Studies McGill University Montreal, 1994), hlm. 54. A. Malik, et. al., *Wacana Pemikiran Santri Dayah*, (Banda Aceh: BRR Nad-Nias, PKPM Aceh dan Wacana Press, 2007) hlm. 203.

terpeliharaan birokrasi ke pemerintahannya dalam wadah kekeliruan dan penyelewengan.

Pada umumnya dayah memiliki potensi besar dalam masyarakat.¹⁰ Dengan demikian alumni dayah memiliki potensi dalam membangun, membina dan mengayomi berbagai lapisan masyarakat. Sehingga semua kalangan dapat merasakan kenyamanan, apalagi dalam masalah pendidikan dan pelatihan pengetahuan Islam.

Dayah merupakan wadah pelatihan mental, fisik dan juga menjadi wadah lahirnya pemimpin masyarakat yang ideal, baik di perkotaan maupun di pelisok perkampungan. Fungsi dayah di tangan masyarakat. Dayah memiliki dua fungsi dalam masyarakat, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan, dan sebagai pembinaan sosial kemasyarakatan. Dua fungsi ini, akan membentuk manusia yang dapat mengembangkan ideologi duniawi dan ukhrawi.

Dayah memiliki elemen-elemen terpenting yang menjadi ciri-ciri sebuah dayah, yaitu Ulama (Tengku: pimpinan),¹¹ santri, pondok/bilik (asrama),¹² mushalla, dan pengajaran kitab-kitab.¹³ Dengan demikian, dapat dikatakan sebuah dayah, apabila sudah memiliki dan berkembangnya lima elemen dasar tersebut.

Pada dasarnya, fungsi dayah dalam masyarakat tidak hanya sebagai tempat pengajian, melainkan juga sebagai tempat

pembinaan pendidikan, karena ia sebagai suatu lembaga keagamaan yang mengajar, mengembangkan serta menyebarkan ilmu agama, kaderisasi yang islami. Dayah mampu menghasilkan ulama yang berpengetahuan yang berkopeten dan siap pakai dalam menyelesaikan masalah baik keagamaan maupun masalah sosial kemasyarakatan.

Upaya kaderisasi ulama, dayah membuat komitmen dalam memberi bimbingan dan pelatihan moral dan spiritual pada setiap santri yang belajar di tempat ini. Sehingga ketika kembali dalam masyarakat menjadi panutan dan pedoman masyarakat serta membimbing dan membina umat dimana dia berdomisili.

Ulama yang merupakan alumni dayah, dapat membentuk solidaritas dalam mengembangkan keislamannya, baik berupa Aqidah, Ibadah maupun muamalah, bahkan meliputi politik dan ekonominya. Maka oleh karena itu, peran ulama dalam masyarakat Aceh menjadi pelopor dalam pendidikan dan permbinaan umat ke arah yang sangat positif. Dengan demikian, antara ulama dan dayah tidak dapat dipisahkan, karena antara ulama dan dayah memiliki konsep satu kesatuan dalam pendidikan dan pembinaan umat.

Dayah sebagai lembaga pendidikan formal di Aceh telah memberikan peran yang sangat signifikan dalam masyarakat Aceh. Data sejarah menyatakan bahwa dayah tersebut telah menghasilkan ulama-ulama yang bukan hanya

¹⁰Misnawati, *Pengaruh Manajemen ...*, hlm. 138-139.

¹¹Dalam hal ini, Ulama adalah orang yang mampu memahami dan mentransformasikan ajaran-ajaran Islam ke dalam masyarakat. Karena itu mereka mendapat hak yang istimewa dalam struktur kelompok Islam tradisional. Ulama adalah orang paling bertanggung jawab dalam memelihara dan menafsirkan hukum Islam yang sesuai dengan pemikiran tradisional. Muhamad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran Dar Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, (Tenggerang : Gaya Media Pratama, 2009), Cet.I, hlm.71.

¹²Pondok merupakan asrama bagi santri untuk tempat tinggal, istirahat dan belajar (mengulang kembali

apa yang telah dipelajari di balai/local). Pentingnya pondok sebagai tempat tinggal dari tempat jauh. Pondok itu terbuat dari barak-barak yang dihuni oleh beberapa orang santri. Setiap pondok diawasi oleh tengku (guru atau santri senior). Pondok itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Lihat: Misnawati, *Pengaruh Manajemen ...*, hlm. 143.

¹³Pengajaran Kitab-kitab kuning meliputi keseluruhannya kitab klasik yang diklasifikasikan dalam 10 kelompok, yaitu: hanwu, sharaf, fiqh, usul fiqh, hadis/ilmu hadis, tafsir/ ilmu tafsir, tahuhid, tashawuf serta balaghah dan tarikh. Lihat: Misnawati, *Pengaruh Manajemen ...*, hlm. 143.

berperan sebagai penyebar dakwah Islam tetapi juga turut berperan dalam bidang pemerintahan dan perpolitikan.

Hal ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan dayah yang terdapat di daerah Aceh telah berhasil mencetak para ulama yang terkemuka di daerahnya dan sebagian dari mereka juga telah menulis kitab-kitab yang terdiri dari pelbagai macam subjek, seperti tasawuf, ilmu kalam, logika, filsafat, fiqh, hadits, tafsir, akhlak, sejarah, tauhid, astronomi, perubatan dan masalah lingkungan.

Di samping itu dayah telah berhasil menjadi agen pengembangan dalam melahirkan tokoh-tokoh yang mampu menciptakan perubahan dan pembangunan dalam pengembangan masyarakat di Aceh. Secara historis, menunjukkan bahwa dayah merupakan lembaga pendidikan Islam pada masa itu menduduki posisi sentral dalam masyarakat dan negara.¹⁴Masa itu, dayah telah mampu menghasilkan alumni-alumni yang sangat berperan dalam kebijakan pemerintah dan juga dalam masyarakat. Sebagian dari tokoh-tokoh ini telah menjadi pemimpin-pemimpin dalam masyarakat dan sebagian lagi menjadi pembina komunitas dalam bidang ibadah dan praktek agama.

Dengan kata lain pada masa sebelum datangnya penjajah Belanda, lulusan dayah menempati posisi penting dalam masyarakat Aceh. Mereka dapat menempati posisi sebagai pemimpin formal yang duduk pada kursi pemerintahan dan ada juga yang menjadi pemimpin informal. Sebagai pemimpin informal ulama dayah menjadi panutan, tempat bertanya, tempat mengadu berbagai

permasalahan yang dihadapi masyarakat sehingga mendapat petunjuk darinya. Bahkan sering pula ulama dayah membimbing masyarakat dalam bermunajat (memohon) kepada Allah SWT.¹⁵

Alumni lembaga pendidikan Islam pada masa itu tidak hanya aktif dalam bidang keagamaan tetapi juga aktif dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Sebagai contoh alumni dayah yang aktif dalam bidang pertanian adalah Teungku Chik di Pasi yang memimpin masyarakat membangun sistem irigasi seperti yang dilakukan oleh Teungku Chik di Bambi dan Teungku Chik di Reubee.¹⁶ Keberhasilan alumni dayah dalam menempati posisi-posisi strategis dalam masyarakat karena dayah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang dianut oleh masyarakat Aceh pada waktu sebelum datangnya Belanda.

Namun demikian, eksistensi dan peran dayah dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi telah mengalami pasang surut.¹⁷ Keberadaan Dayah pada masa perang melawan Belanda mengalami kemunduran, ini karena seluruh Ulama Dayah dan santrinya itu ikut berjuang melawan penjajah Belanda, sebagian besar para Ulama dan Tengku dayah syahid di medan perang, di antaranya Tengku Chik Haji Ismail anak Tengku Chik Pante Ya'kop (Pendiri Dayah Tgk Chik Pante Gelima), beliau syahid dalam peperangan melawan Belanda dalam mempertahankan Kuta Glee (Kawasan Batee Iliék Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen), bersama dengan Tengku Chik Lueng Kebue dan Tengku Syiek Kuta Glee.

Faktor lain yang menghambat perkembangan Dayah saat itu disebabkan

¹⁴Inayatillah, Peran Perguruan Tinggi Islam Pasca Penerapan Syariat Islam Di Aceh, dalam *The Role of Islamic Higher Learning Institution in Building Civil Society*, (STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa-Aceh 2010), hlm.43

¹⁵Shabri, et al., *Kedudukan dan Peran Dayah di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2005), hlm. 71.

¹⁶Baihaqi A.K., "Ulama dan Madrasah Aceh", dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 117.

¹⁷Lembaga pendidikan Islam pada masa ini tidak hanya berperan sebagai *transfer of knowledge* tetapi juga berperan sebagai tempat untuk membina pengikut-pengikut dan untuk menghimpun kekuatan menghadapi Belanda. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.151.

karena Belanda melakukan upaya-upaya untuk menghambat pendidikan Agama Islam, serta Belanda menyebarkan pendidikan Barat di Aceh, sehingga menyebabkan Dayah terbengkalai. Selain itu, Belanda melakukan pembakaran terhadap Dayah-dayah dan membunuh seluruh staf pengajarnya serta membunuh seluruh staf perpustakaan yang ada di Dayah, jika ada dayah yang masih bertahan itupun dibangun di daerah terisolir dan jauh dari pantauan Belanda.

Setelah usainya peperangan pada tahun 1904 M, barulah Dayah-dayah yang telah terbengkalai tersebut dibangun dan dibenahi kembali untuk dapat digunakan kembali sebagai lembaga pendidikan, adapun Dayah yang dibangun kembali setelah perang Aceh usai antara lain, di Aceh Besar: Dayah Tanoeh Abee, Dayah Lambirah oleh Tengku Syik Lambirah, sedangkan adiknya Tengku Haji Ja'far (Tengku Syik Lamjabat) membangun Dayah Jeureula, selanjutnya juga dibenahi Dayah Lamnyong, Dayah Lambhuk, Dayah Ulee Susu, Dayah Indrapuri, Dayah Lamsenouen, Dayah Krueng Kale, Dayah Montasik dan masih banyak lagi Dayah-Dayah yang dibangun di Daerah Aceh Besar. Tidak hanya di kawasan Aceh Besar, Pidie, Aceh Urata, Aceh Barat dan beberapa daerah lainnya di Aceh juga ikut membenahi kembali Dayah yang hancur atau ditinggalkan karena perang kala itu.

Keberadaan Dayah pada masa perang melawan Belanda mengalami kemunduran, ini karena seluruh Ulama Dayah dan santrinya itu ikut berjuang melawan penjajah Belanda, sebagian besar para Ulama dan Tengku dayah syahid di medan perang.

Perlu diketahui, saat itu banyak Ulama yang ikut berjuang namun tidak sedikit juga diantara mereka yang mengasingkan diri keluar Aceh, diantaranya ke Negeri Keudah (Malaysia Sekarang). Salah satu tempat penting mereka berkumpul adalah Negeri Yan di Keudah, di sinilah mereka melanjutkan tradisi pendidikan Dayah selama perang Aceh berlangsung,

setelah perang reda, mereka yang tadinya mengasingkan diri segera pulang untuk kembali melanjutkan dan membangun kembali sistem pendidikan Dayah yang telah mengalami kemunduran pada saat perang berkecamuk, di samping tokoh Ulama yang pulang dari negeri Yan, ada juga yang langsung pulang dari Mekkah, seperti Tengku Haji Muhammad Thahir Cot Plieng, bahkan beliau pernah bertemu dengan Snouck Hogrounje saat sama-sama berada di Mekkah.

Setelah perang selesai, Dayah mengalami perkembangan, walaupun perkembangan yang terjadi pada waktu itu tidak begitu berarti, karena pada saat itu para Ulama Dayah disibukkan dengan perlawanan melawan Jepang, serta kebijakan Jepang saat itu menerapkan kerja paksa serta mengabaikan sisi-sisi lain dalam kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan di dalamnya. Beberapa hal tersebut membuat Dayah dalam kurun waktu 3,5 Tahun masih jalan di tempat.

Pada masa kemerdekaan mulai tahun 1945 M, perkembangan Dayah sudah menampakkan hasil yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan Dayah Darussalam Labuhan Haji Achah Selatan, Dayah MUDI MESRA Samalanga, Dayah BUDI Lamno, dan dayah-dayah yang lain. Tidak hanya Dayah, Sekolah pun mulai berkembang, sekolah bersifat Negeri dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah sedangkan Dayah umumnya bersifat pribadi yang dikelola oleh Pimpinan Dayah sendiri dengan bantuan swadaya masyarakat.

Itulah faktor-faktor penyebab kemunduran peran dayah. Sehingga ditambah lagi dengan kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah telah membuat lembaga ini terpinggirkan. Dampak yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah telah membuat perubahan pola pikir masyarakat terhadap peran dayah yang semakin sempit. Sehingga upaya untuk merevitalisasi peran dayah tersebut, perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara bersinergi.

ULAMA DALAM PEMBINAAN UMMAT

1. Panutan, Pembimbing, Pelindung Ummat

Eksistensi ulama dalam masyarakat juga berperan sebagai pemimpin umat dan simbol pemersatu. Sebagai pemimpin informal alim ulama menjadi panutan, tempat bertanya dan tempat mengadu berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga mendapatkan petunjuk dan petunjuk darinya. Tidak jarang pula masyarakat dalam bermunajat (memohon) sesuatu kepada Allah swt melalui bimbingan dan perantara para alim ulama.

Namun, apabila ditelusuri, bahwa posisi ulama dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam/dayah di Aceh mengalami pergeseran seiring dengan kedatangan penjajah Belanda. Dayah pada masa ini tidak hanya berperan sebagai *transfer of knowledge* tetapi juga berperan sebagai tempat untuk membina pengikut-pengikut dan untuk menghimpun kekuatan menghadapi Belanda.¹⁸ Maka, karena itu, lembaga pendidikan pada masa ini digunakan sebagai pusat perlawanan terhadap Belanda maka letak lembaga pendidikan Islam mengalami pergeseran dari awalnya terletak di pusat kota menjadi terletak di pedalaman.

Sementara itu kedatangan Belanda ke Aceh tidak hanya untuk menjajah tetapi juga melakukan *transfer of value* dengan mendirikan pendidikan-pendidikan sekuler di Aceh. Lambat laun pasca kemerdekaan Republik Indonesia keberadaan lembaga pendidikan sekuler (yang diperkenalkan oleh Belanda)¹⁹ ini telah berhasil menduduki posisi sentral dalam pembangunan di Aceh. Dimana banyak alumni-alumni pendidikan sekuler yang mendapat peluang untuk bekerja di berbagai bidang. Mereka tidak hanya dapat bekerja di kantor-kantor pemerintahan tetapi juga dalam bidang

jasa kedokteran, bisnis, perindustrian, dan sebagainya, sedangkan alumni-alumni lembaga pendidikan Islam hanya bekerja dalam bidang dakwah. Oleh karena itu penerapan Syaria'at Islam di Aceh dapat dijadikan momentum untuk mengembalikan kedudukan dan peran lembaga pendidikan Islam yang selama ini berada pada posisi marginal untuk dapat menempati posisi sentral dalam pembangunan di Aceh. Dimana upaya untuk mengembalikan peran dan kedudukan lembaga pendidikan Islam tidak untuk menggeser posisi lembaga pendidikan umum, akan tetapi dengan cara mensinergikan kedua lembaga pendidikan tersebut dalam mengisi pembangunan di Aceh.

Permasalahan utama yang harus dijawab adalah bagaimana sejarah sosial lembaga pendidikan Islam di Aceh sebagai pusat keilmuan dan peradaban Islam dan usaha apa yang perlu dilakukan oleh ulama agar dapat mengembalikan perannya yang utama dalam pembangunan di Aceh. Dimana penerapan Syariat Islam di Aceh dapat dijadikan sebagai peluang dan juga sekaligus tantangan bagi ulama untuk dapat berperan dalam pembangunan di Aceh.

Maka dalam hal ini, untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam tatanan kehidupan masyarakat, perlu melibatkan bukan hanya ulama, namun hendaknya dapat dilibatkan semua unsur yang ada di dalamnya. Demikian jua peran serta masyarakat seharusnya lebih diharapkan karena masyarakat dijadikan objek dalam menumbuhkan kebudayaan yang islami. Maka oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang madani (*civil society*) bukanlah perkara yang mudah, masyarakat memerlukan pemimpin yang ideal yang tidak mengalami krisis kepercayaan terhadap pemimpin. Masyarakat memerlukan

¹⁸Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.151.

¹⁹Meskipun pemerintah RI mewarisi semua model pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda, namun pendidikan yang berlaku pada masa kemerdekaan sampai dengan seterusnya tidak dapat

dikatakan sebagai pendidikan sekuler karena dalam pendidikan ini ada terdapat mata pelajaran agama walaupun mata pelajaran agama hanya diajarkan satu jam dalam seminggu. Oleh karena itu, untuk istilah selanjutnya penulis lebih memilih untuk menggunakan istilah "pendidikan umum" atau "pendidikan nasional".

sosok pemimpin yang betul-betul berpengaruh dalam mengemban pembangunan, baik sarana fisik maupun sarana intelektual. Betapa pentingnya peran ulama dalam upaya memberantas budaya masyarakat tidak menyentu agama Islam dalam yang selalu penuh curiga dalam ketidak beresan terhadap pembinaan moral.

Maka oleh karena itu, untuk membutuhkan peran ulama yang sangat signifikans, itu menumbuhkan upaya dalam menumbuhkan dukungan dan partisipasi serta keikutsertaan pemimpin dan masyarakat dalam membentuk, membina masyarakat, baik moral spiritual maupun intelektual, maka untuk mendeskripsikan peran serta ulama dalam mengatasi masalah tersebut.

Secara historis, ulama, disamping membina umat, mereka juga menjadi pemimpin dalam perjuangan mempertahankan negara dan agama dari agresi/rongrongan penjajah dan juga dalam masa mengusir penjajah yang telah berusaha menduduki tanah air secara paksa, baik di Aceh maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Posisi tersebut dipikul bukan karena sebagai penanggungjawab ketika itu, akan tetapi hanya sekedar ingin membebaskan umat dan tanah air dari cengkeraman penjajah. Yang lebih mengagumkan semua pihak adalah hal ini dilakukan malah ketika pemimpin-pemimpin negara tidak sanggup lagi mengajak rakyatnya untuk mempertahankan tanah air ini.²⁰

Hal ini semakin membuktikan bahwa besarnya pengaruh ulama dalam masyarakat, menjadi sebuah panutan dalam mengembangkan syariat kepada kaum juhala'. Maka, karena itu, keterlibatan ulama dalam masyarakat untuk memberantas ketidakadilan pemimpin terhadap negara dan agama di Indonesia sangat lebih diharapkan. Pemerintah secara dini seharusnya mendukung peran ulama dengan cara memberi kesempatan yang lebih luas terhadap ulama. Dapat kita lihat sekarang

adalah ulama hanya dilibatkan ketika urusan-urusan pemerintahan dalam keadaan darurat atau sebagai kolaborator kekuasaan. Segelintir orang memanfaatkan kedekatan ulama dan umatnya untuk mempermulus kancahnya di jalur politik.

Keterlibatan ulama sangat diperlukan dalam upaya menumbuhkan dukungan, partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam mengembangkan syariat Islam. Mayoritas masyarakat dan ulama sebagai pengajar utama nilai-nilai agama menjadikan hubungan keduanya sangat erat. Ulama adalah bagian berharga dari masyarakat, melibatkan ulama berarti melibatkan keseluruhan masyarakat.

Mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam memberantas budaya korupsi bukanlah hal yang mudah. Berbagai macam pemikiran dan kepentingan menghalanginya. Ada yang begitu bahagia dengan pemberantasan budaya korupsi, ada juga yang bahagia dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan segolongan. Ulama selaku pemimpin spiritual masyarakat memiliki andil yang penting dalam menyadarkan masyarakat, tentunya dengan dukungan pemerintah. Karena ulama hanya mampu mendorong masyarakat untuk terlibat. Berbagai ancaman yang akan terjadi hendaknya diantisipasi dengan tanggap oleh pemerintah.

Pengaruh ulama begitu penting di dalam masyarakat. Namun kalau ulama dalam hal ini tidak dilibatkan dalam upaya menegakkan syariat dan membentuk pribadi muslim seutuhnya penting.

Peran ulama telah terbukti semenjak sebelum zaman penjajahan kolonial Belanda. Sampai sekarang, pengaruhnya dalam masyarakat masih tetap eksis dan terjaga. Hal ini, untuk melibatkan ulama secara aktif tidaklah memadai hanya dengan kampanye atau berbagai seruan bahkan ancaman. Kesadaran dari dalam diri sendiri mutlak diperlukan guna

²⁰Hasbi Amiruddin, dalam *Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX*, (2003). can be ordered

terwujudnya budaya malu korupsi. Pemerintah, pihak-pihak terkait lainnya dapat saja mengusahakan melibatkan masyarakat, tetapi membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jabatan sebagai wakil rakyat atau peran pihak tertentu dalam pemberantasan budaya korupsi ada batas waktunya. Tetapi ulama tetaplah ulama yang menjadi lampu penerang bagi masyarakat. Melibatkan ulama secara lebih jauh dalam upaya menumbuhkan dukungan dan partisipasi serta keikutsertaan masyarakat dalam memberantas korupsi perlu dilakukan dengan sesegera mungkin, demi terciptanya sebuah masyarakat madani yang bebas dari berba-ha kemaksiatan, baik dalam aparatur pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

2. Ulama Aceh sebagai muballigh Nusantara

Sebagai muballigh, para ulama dalam menyampaikan risalah agama ke seluruh pelosok nusantara. Para ulama ini umumnya sangat menguasai retorika berdakwah agar disenangi oleh umatnya.²¹ Maka, jauh sebelum

kesulthanan Aceh berdiri, ulama dari kesulthanan yang ada di wilayah Aceh sudah mendapatkan tugas dalam dakwahnya ke seluruh nusantara. Pengiriman ulama dari Aceh untuk menyampaikan risalahnya keseluruh Asia Tenggara, oleh sulthan kesulthanan Peureulak mengirim muballigh ke semenanjung Malaka sehingga para ulama yang berdakwah kesana bergabung dengan ulama dari Arab.

Pada masa sulthan Malik al Zahir²² yang merupakan sulthan kedua dalam kesulthanan Samudera Pasai. Sulthan Malik al Zahir mengirim juga juru dakwah dan ulama ke seluruh Nusantara, diantaranya pengiriman Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak untuk melakukan dakwah ke pulau Jawa. Dalam perkembangan dakwah, Maulana Malik Ibrahim berhasil menjadi dakwah ulung di tanah Jawa.²³ Maulana Malik Ibrahim sanggup melakukan Islamisasi diberbagai daerah di pulau Jawa sehingga Maulana malik Ibrahim dikenal dengan sesupuh wali Songo.²⁴

²¹Lihat: Jalaluddin Rakhmat, ... 1994, hlm.2

²²Sulthan Malik al Zahir merupakan putra dari Sulthan Malik al Shalih (Malikushahlih) perdiri kesulthanan Samudera Pasai sekaligus sebagai sulthan yang pertama. Hasil perkawinan Malik Al Shalih dengan putri dari kesulthanan Peureulak yang terakhir Sulthan Malik Abdul Aziz Syah bernama Putri Ganggang. Sulthan Malik al Shalih dikaruniai seorang anak bernama Al Malik Al Zahir. Pada kesulthanan Samudera Pasai dipengang oleh al Malik Al Zahir, maka kesulthanan Peureulak digabungkan dengan kesulthanan Samudera Pasai. Sulthan Malik Al Zahir memerintahkan pada tahun 1326-1349. Pada masa ke pemerintahannya, Samudera Pasai memiliki masa keemasan. Sulthan berpegang teguh kepada mazhab Ahli Sunnah, sangat perhatian kepada Islam, gemar mengadakan majelis-majelis ilmu, mendatangi ulama-ulama yang ahli dalam bidang fiqh dan ulama-ulama yang ahli dalam bidang syair dan filsafat. Sulthan Malik seorang pemimpin perang yang agung, dan ia telah memproklamirkan perang bagi penyembah berhala, sehingga penyembah berhala itu tunduk pada pemerintahannya dan membayar *jizyah* (upeti) kepadanya. Lihat: Wan Husein Azmi, *Islam di Aceh Masuk dan Berkembangnya Hingga abad XVI* dalam A. Hasyimi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: al

Ma`arif, 1993), Cet.3, hlm.205. Lihat juga: Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Al Ma`arif, 1981), hlm.197. Lihat Juga: Darmawijaya, *Kesultanan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010), Cet.1, hlm.36.

²³Menurut Buya Hamka, bahwa Maulana Malik Ibrahim digelar dengan Fatahillah yang diberi nama oleh sulthan Trenggono, karena keberhasilannya dalam menguasai banten untuk menjadi daerah Islam. Lihat: Munziirin dkk, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pinus, 2006), hlm.89-90. Lihat juga Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm.213.

²⁴Menurut Abdul Qadir Djailani dalam bukunya *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, Samudera Pasai merupakan pusat pendidikan Islam pertama di Indonesia, dan dari sini berkembang ke berbagai daerah lain di Indonesia, hingga sampai ke Pulau Jawa. Salah seorang santri alumni Samudera Pasai adalah Maulana Malik Ibrahim, yang diutuskan ke Jawa, ia datang ke Gresik Jawa Timur pada tahun 1399 dan wafat pada tahun 1419, setelah melakukan dakwah selama dua puluh tahun lamanya, sebelumnya, Maulana Malik Ibrahim bertugas sebagai Muballigh di daerah Campa yang merupakan daerah

Pengiriman juru dakwah juga dilakukan untuk melakukan dakwanya ke Sulawesi. Juru dakwah yang dikirim ke Sulawesi ini merupakan rombongan yang dipimpin oleh Raja Abdul Jalil bin al Qahhar dan dibimbing oleh seorang ulama dari Arab yang bernama Sheikh Ali al Qaisar.²⁵

Samudra Pasai sudah banyak mengirimkan mulalighnya daerah-daerah yang perlu dilakukan Islamisasi secara serentak. Demikian juga daerah sekitarnya sampai ke Aceh Darussalam. Aceh Darussalam juga merupakan pusat studi dan pengembangan Islam di Asia Tenggara. Di Aceh Darussalam dibangun mesjid Baiturrahman yang megah, rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga pengkajian Islam (Dayah/Pesantren), sehingga Aceh Darussalam lahirkan ulama-ulama besar,²⁶ seperti Hamzah Fansuri,²⁷ Syamsuddin al Sumatrani,²⁸ Nuruddin Al Raniry,²⁹ Abdul Ra'uf al Singkili dan banyak ulama-ulama lainnya.

Syeikh Hamzah Fansuri lahir di kota Barus, bahagian barat Daya Aceh. Beliau hidup pada masa sulthan Ali Riayat Syah (1588-1604) sampai sulthan Iskandar Muda (1607-1636).³⁰ Amzah Fansuri terkenal tasawufnya dengan

faham *Wahdat al Wujud*, yang menjadikan makhluk bisa bersatu dengan Tuhan. Karya-karyanya adalah *Asrar al Arifin fi Bayani ilmi al Suluki wa al Tauhid*, *Syarb al Asyiqin*, *Al Muhtadi* dan *Rubali Hamzah Fansuri*.³¹

Syaikh Syamsuddin al Sumatrani sebagai murid dari Syeikh Hamzah Fansuri. Ulama-ulama tersebut memiliki kharisma yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Aceh Darussalam pada dalam menjalankan kesulthanan Aceh, termasuk masa sulthan Iskandar Muda (1607-1636), sehingga hampir semua peran dipegang oleh ulama dalam peran sebagai penasehat sulthan. Setelah wafatnya sulthan Iskandar Muda, Syaikh Syamsuddin al Sumatrani diganti oleh Syaikh Nuruddin Al Raniri.³²

Syaikh Nuruddin Al Raniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi tasawuf, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang-lebih 29 kitab, yang paling terkenal adalah "*BustanalSalatin*" (taman Raja-Raja) dan "*Shiratal Mustaqim*" (Jalan yang Lurus).

Kesultanan Samudera Pasai, setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, Dayah juga diteruskan oleh anak beliau Raden Rahmat (Sunan Ampel).

²⁵Lihat: Wan Husein Azmi, *Islam di Aceh Masuk dan Berkembangnya Hingga abad XVI* dalam A. Hasyimi, *Sejarah Masuk ...*, hlm.210. Lihat Juga: Darmawijaya, *Kesultanan ...*, hlm. 39.

²⁶Harun Nasution dkk, *Ensiklopedi ...*, hlm.472.

²⁷Syeikh Hamzah Fansuri lahir di kota Barus, bahagian barat Daya Aceh. Beliau hidup pada masa sulthan Ali Riayat Syah (1588-1604) sampai sulthan Iskandar Muda (1607-1636). Sri Mulyati, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2006), Cet.1, hlm.73. Hamzah Fansuri terkenal tasawufnya dengan faham *Wahdat al Wujud*, yang menjadikan makhluk bisa bersatu dengan Tuhan. Karya-karyanya adalah *Asrar al Arifin fi Bayani ilmi al Suluki wa al Tauhid*, *Syarb al Asyiqin*, *Al Muhtadi* dan *Rubali Hamzah Fansuri*. Darmawijaya, *Kesulthanan ...*, hlm.49.

²⁸Syeikh Syamsuddin al Sumaterani adalah ulama yang berpegang sebagai mufti pada masa sulthan

Iskandar Muda. Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta Rajawali Press, 2005), Cet.1, hlm.139.

²⁹Nuruddin Al-Raniri, nama lengkap adalah *Syeikh Nuruddin Muhammad ibnu 'Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi*. Ia adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani (Iskandar II). Syaikh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar akhir abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637, ia datang ke Aceh, dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644. [http://id.wikipwdian.org/wiki/Nuruddin Al-Raniri/mw/heed](http://id.wikipwdian.org/wiki/Nuruddin_Al-Raniri/mw/heed).

³⁰Sri Mulyati, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2006), Cet.1, hlm.73.

³¹Darmawijaya, *Kesulthanan ...*, hlm.49.

³²Darmawijaya, *Nikmatnya Tashawuf: mengupas Kisah Sukses Ulama Tashawuf dalam Islamisasi Nusantara*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2007), hlm. 38

Al Raniri³³ berperan penting saat berhasil memimpin ulama Aceh menghancurkan ajaran tasawuf falsafinya Hamzah al-Fansuri yang dikhawatirkan dapat merusak akidah umat Islam awam terutama yang baru memeluknya. Tasawuf falsafi berasal dari ajaran Al-Hallaj, Ibn `Arabi, dan Suhrawardi, yang khas dengan doktrin *Wihdatut Wujûd* (Menyatunya Kewujudan) di mana sewaktu dalam keadaan *sukr* ('mabuk' dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala) dan *fana' ftAllah* (hilang bersama Allah), seseorang wali itu mungkin mengeluarkan kata-kata yang lahiriahnya sesat atau menyimpang dari syariat Islam.

Maka oleh karena itu, Nuruddin Al Raniri memberikan sebuah fatwa bahwa paham *Wahdat al Wujûd* adalah sesat dan pengikutnya adalah kafi. Memberikan fatwa juga kepada sulthan Iskandar Tsani untuk membakar kitab-kitab yang ditulis oleh Hamzah Fansuri beserta muridnya Syamsuddin al Samatrani. Nuruddin Al Raniri menghimbau kepada penganut faham Wahdat al Wujud, agar mereka bertaubat, dan apabila tidak mahu bertaubat, maka dapat dijatuhkan hukuman mati.³⁴

Syekh Abdurrauf al Singkily adalah salah seorang ulama yang dikenal memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemerintahan Aceh pada masa itu. Beliau tidak hanya berperan dalam pemerintahan tetapi juga memiliki lembaga pendidikan Islam yang telah menghasilkan ulama-ulama yang berperan penting dalam proses islamisasi di wilayah nusantara dan juga telah mencapai wilayah manca negara. Diantara ulama-ulama yang belajar dengan Syekh Abdurrauf as Singkili adalah Burhanuddin, atau dikenal dengan Tuanku Ulama berasal dari Minangkabau, Abdul Muhyi dari Jawa Barat, Abdul Malik

Abdullah yang dikenal dengan Tok Pulau Manis dari Trengganu dan beberapa ulama lainnya.³⁵

Karena pemahamannya faham *wahdat al wujud* dianggap sesat, Syekh Abdurrauf al Singkili mendamaikan dengan faham sunnah sebagaimana yang dibawakan oleh Nuruddin Al Raniri.³⁶ Syekh Abdurrauf al Singkili melanjutkan tugas Nuruddin Al Raniri sebagai penasehat sulthan ketika Aceh dipimpin oleh Ratu Shafiatuddin, Isteri Sulthan Iskandar Tsani sekaligus anak sulthan Iskandar Muda.³⁷

Syeikh Abdul Rauf al Singkili wafat pada tahun 1693 dan dimakamkan dekat kuala Sungai Aceh (Krueng Aceh). Hingga kini, makamnya menjadi tempat ziarah dan wisata bagi berbagai lapisan masyarakat yang datang dari dalam Aceh, maupun dari luar Aceh.³⁸

Inilah ulama-ulama besar Aceh yang sangay banyak berkiprah dalam menentukan kesulthanan Aceh Darussalam kegerbang kejayaan.

A. ULAMA DALAM PERUBAHAN ZAMAN

Menghadapi problematika perubahan zaman, ulamalah yang menjadi ujung tombak di barisan depan. Hal ini, menjadi sebuah cobaan dan ujian. Melalui ujian ini, maka terlihatnya kualitas keimanan, mampukah ia memanfaatkan waktu untuk kebajikan atau justru sebaliknya. Karena itu, dapatkan ulama melihat, memperhatikan dan mengamati kondisi umat kapan dan di mana ia berada.

Ulama Aceh pada masa dahulu mempunyai martabat dan supremi yang sangat membanggakan ketika melaksanakan nilai-nilai syariat Islam dalam masyarakat.³⁹ Ulama merupakan suatu *achieved status* yang

³³Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama (IAIN) di Banda Aceh

³⁴Lihat: Darmawijaya, *Nikmatnya Tashawuf*: ..., hlm. 45

³⁵Azzumardi Azra, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII : melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 256-257.

³⁶Lihat: Darmawijaya, *Nikmatnya Tashawuf*: ..., hlm. 45-47

³⁷Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban* ..., hlm.140.

³⁸Darmawijaya, *Kesulthanan* ..., hlm.52

³⁹Maulidi Qurdi, *Martabat Ulama di Wilayah Syariat*, dalam Syamsul Rizal dkk, *Syariat Islam dan*

diusahakan oleh seseorang melalui proses yang panjang. Status tersebut diperoleh tidak hanya karena penguasaan ilmu-ilmu Agama Islam tetapi juga karena penerapan ajaran-ajaran agama Islam dalam sikap dan perilaku keseharian. Selain itu, bahkan yang terpenting adalah bahwa status ulama itu dilegitimasi oleh pengakuan masyarakat atas penguasaan ilmu-ilmu Agama Islam dan keshalihan religius yang bersangkutan. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, ulama dikategorikan sebagai elit tradisional yang telah dan sedang memainkan peranan penting dengan berbagai strategis.

1. Perjuangan dalam Ghazwul Fikri

Umat Islam sebagai umat yang baik dan mulia ternyata tidak lagi nampak kemuliannya ditengah manusia lain, bahkan nampak semakin terik sebagai hasil keadaan jahiliyah yang semakin merajalela saat ini, hal ini mengakibatkan, bahwa keadaan umat Islam sekarang mengalami kehinaan dan berada dibawah kendali musuh-musuh Islam. kondisi seperti ini, disebabkan oleh umat Islam itu sendiri yang memiliki sejumlah kelemahan. Yang paling mendasar adalah *aqidah, tarbiyah, tsaqofah, dakwah, pengorganisasian/tanzim, akhlak*. Keadaan ini berlaku disebagian muslim tersebut nampak tidak mengamalkan ibadah wajib seperti sholat, berpakaian muslimah, zakat dan berpuasa. Keadaan demikian harus diperbaiki dengan menyediakan dakwah harakiyah yang integral dan bersifat *rabbaniyah, minhajiyah, marhaliyah* dan *ulawiyah* serta sesuai dengan reality dan seimbang.

Dalam melakukan pembinaan untuk membentuk pola pikir dan memperjuangkan dalam hal yang terbaik itu adalah dengan melihat beberapa aspek, yaitu aspek kejahilan, moral dan sampai berkembangnya aliran yang sudah jauh menyimpang dengan ajaran Islam itu sendiri.

- *Kejahilan dan Kesesatan*

Nilai-nilai universal yang Islami yang menjadi ramuan pola pikir para ulama merupakan sebuah keyataan sejarah dalam perkembangan masyarakat Aceh. Hal ini yang harus di jalankan oleh ulama di Aceh, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka eksistensinya telah berintegrasikan dengan kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan syariat Islam, baik melalui adat kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi suatu kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Aceh melalui proses akulturasi yang berjalan dengan periode dan waktu yang panjang, maupun melalui enkulturasi melalui proses pembinaan ilmu pengetahuan.

Proses pembinaan ilmu pengetahuan, terjadi dalam dunia pendidikan, kehadiran dayah/pesantren yang mempunyai sejarah lama, dan merupakan awal pendidikan modern dalam berbentuk madrasah, sekolah, perguruan tinggi Islam atau (PT) yang bercorak keislaman. Perkembangan ini secara integral dan telah memberikan revis terhadap citra sekolah yang bersifat umum yang meniru sistem Barat. Hal yang sama terjadi pula pada pendidikan nonformal, mulai dari bentuk pengajian sampai pada kursus-kursus diniyat yang diselenggarakan di mesjid dan masyarakat Islam hingga latihan-latihan dan bela diri.⁴⁰ Demikian juga dapat disangkan peranan penyelenggaraan pendidikan informal yang membentuk keyakinan dan citra masyarakat Aceh ke depan.

Kejahilan mengakibatkan merambak berbagai aliran sesat sebagaimana yang terlihat di seluruh Indonesia sekarang sudah berkembang bagaikan jamur yang tumbuh di musim hujan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya iman dan tingginya tingkat intervensi asing yang merupaka factor utama tersebarnya aliran-aliran sesat tersebut.

Paradigma Kemanusiaan, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov NAD: 2008), hlm.198.

⁴⁰Lihat: Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi ...*, hlm. 288.

Dalam skala lokal, Aceh yang di juluki dengan Serambi Mekkah, sekarang juga sedang dihebohkan dengan ajaran sesat yang banyak menyita perhatian publik, seperti Millata Abraham. Aktivis-aktivis aliran tersebut tidak hanya menyeimbangi para masyarakat awam saja, tapi juga kaum terpelajar mahasiswa dan mahasisiwi yang kurang pasokan konsep iman. Mereka menggedok para pengikutnya dengan uang tunai sebesar lima belas juta per bulan.⁴¹ Hal ini, tentu merupakan sebuah tamparan keras bagi pemerintah Aceh umumnya dan Dinas syari`at Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) atau (di Indonesia MUI) dan instansi terkait khususnya, seolah-olah mereka telah lalai atau tidak mampu dalam membendung aliran sesat tersebut, padahal itu mutlak menjadi tugas dan tanggungjawab mereka selaku perpanjangan tangan pemerintah.⁴²

Menurut ketetapan Memerintah Aceh, bahwa aliran sesat yang sudah berkemabang di Aceh berjumlah 14 aliran, sementara yang diindikasi oleh POLDA Aceh sebanyak 8 buah aliran. aliran-aliran sesat lainnya yang sedang dipantau oleh pemerintah, ulama dan masyarakat Aceh berjumlah 27 Aliran.

Upaya pendangkalan aqidah dan penyebaran aliran sesat serta pemurtadan terhadap masyarakat Aceh, yang selama ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sangat meresahkan masyarakat Aceh.⁴³ Munculnya berbagai aliran sesat sekarang ini tentu menimbulkan inisiatif yaitu pihak dinas syari`at Islam dan instansi terkait harus bisa berkerja secara maksimal, walaupun tidak ada biaya operasional dalam memberantas aliran sesat ini. Sumber daya yang ada harus mempunyai keberanian dalam mencegah aliran sesat tersebut. Jangan sampai, dengan maraknya aliran sesat yang bermunculan dewasa ini

semakin membuat individu yang khawatir dan rasa takut terhadap akidah generasi bangsa masa depan, karena itu menjadi sebuah celah yang bisa dimasuki oleh siapa saja terlebih orang-orang yang tidak pernah mempelajari agama sama sekali.

Diantara aliran-aliran sesat yang berkembang di Aceh "Millata Abraham" yang muncul di Kabupaten Bireuen. Aliran ilmu Laduni berkembang di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Barat Daya. Demikian juga dengan perkembangan Thariqan Naqsyabandi yang dipelopori oleh Qadirun Yahya. Di antara aliran-aliran yang lain, disinyalir telah menyimpang dari ketentuan agama Islam. Hasil investigasi Laskar Pembela Islam (LPI) menemukan aliran pimpinan Wak Iman ini menganjurkan pengikutnya untuk tidak mendirikan Shalat Fardhu (wajib 5 waktu) dengan alasan bahwa mereka masih tahap ma'rifat (mengenal Allah) belum sampai tahap Fiqh.⁴⁴

Terungkapnya beberapa aliran sesat belum lama ini tentu menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa masih banyak aliran-aliran sesat yang belum terungkap, dan itu menjadi sebuah pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua untuk terus mengungkap berbagai aliran-aliran yang selama ini telah meresahkan masyarakat banyak, karena munculnya berbagai aliran sesat tersebut akibat dari lemahnya pengawasan serta tidak ada sanksi tegas dari pihak terkait dalam memberantas aliran sesat.⁴⁵

Dengan kondisi seperti ini, maka dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat, baik dari pemerintah, ulama maupun masyarakat itu sendiri. Maka, bagi para pemimpin bangsa dan agama tersebut, baik itu ditingkat yang paling tinggi maupun ditingkat yang paling rendah, mereka dinilai telah gagal dalam menjaga kemurnian agama dari nilai-nilai yang dapat

⁴¹Ibid.

⁴²Zulfikar, acehnationalpost.com/opini/2183/aliran-sesat-dansesat-aliran.

⁴³rakyat.aceh.com, Jumat, 21 September 2012

⁴⁴arrahmah.com, MUI akan tindak aliran sesat ASMA, Rabu, 10 Zulqaidah 1433 H / 26 September 2012

⁴⁵Zulfikar, acehnationalpost.com/opini/2183/aliran-sesat ...

merusak dan menghancurkan agama secara pelan-pelan. Kenyataan inilah yang menjadi sebuah potret kelam bagi para pemegang kekuasaan, apakah mereka memang tidak tahu tentang semua itu atau mereka tidak mampu mencegahnya? Secara kritis dapat dilihat bahwa seperti adanya maksud membiarkan saja disaat mereka menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya aliran-aliran yang sesat, apakah itu sengaja dilakukan atau cuma secara kebetulan saja.⁴⁶

Untuk mengantisipasi dan membentengi umat dari upaya pendangkalan aqidah, pemurtadan dan aliran-aliran sesat tersebut, ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melakukan berbagai upaya diantaranya kegiatan pembinaan Aqidah Islam di setiap kabupaten dan kota di propinsi Aceh, Seperti dilakukan oleh MPU Provinsi Aceh hari Kamis tanggal 20 September 2012 lalu di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karang Baru, Aceh Tamiang.

Kegiatan Pembinaan Aqidah Islam diikuti unsur Pemkab Aceh Tamiang tokoh agama, Ormas, tokoh masyarakat dan segenap elemen masyarakat, membahas berbagai hal terkait penyebaran aliran sesat. Ketua Pelaksana Kegiatan, Husnul Maab.S.Pd. M. Pd mengatakan, tujuan digelarnya acara Pembinaan Aqidah Islam antara lain, memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang aqidah benar.⁴⁷ Menginformasikan kepada masyarakat tentang pola jejaring aktor intelektual terhadap kegiatan pemurtadan dan aliran sesat.

2. Pengembangan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan

Ulama telah memainkan berbagai peranan politik, social kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan maupun kebudayaan, dan tentu saja yang terpenting adalah keagamaan. Pada masa kesultanan, para ulama memainkan peranan penting dan bahkan menentukan dalam

pemerintahan, selain bidang keagamaan. Penguasa baru (sultan) biasanya sangat mengandalkan legitimasi dari ulama yang menobatkan sultan tersebut sebagai penguasa baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang keagamaan. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah kesulthanan baik di Aceh maupun di luar Aceh dalam kawasa Asia Tenggara ataupun di belahan dunia lainnya.

Memposisikan ulama dalam masyarakat Aceh adalah posisi yang sangat penting dan strategis tidak hanya karena alasan-alasan teologis tetapi juga histories-sosiologis. Secara teologis, sebagaimana tersebut di atas, ulama adalah *ahli ilmu* dan *ahli agama* yang keduanya adalah *waratsah al-ambiya* (pewaris para nabi) yang memiliki kedudukan sebagai penerus tugas dan fungsi nabi dalam risalah kenabian bagi umat manusia. Secara histories sosiologis, '*ulama*' memiliki otoritas dalam bidang keagamaan sehingga menempati kedudukan social yang tinggi dalam masyarakat Muslim. Mereka tidak hanya sekedar dihormati dan disegani tetapi gagasan dan pemikiran keagamaannya dalam berbagai dimensi dipandang sebagai "kebenaran", dipegang dan diikuti secara kuat dan bahkan mengikat.

Apalagi, sekarang pemerintah Indonesia telah menerapkan otonomi daerah dibarengi dengan pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) secara langsung. Maka, struktur social politik dan pemerintahan yang telah berubah dari pemerintahan sentralistik menjadi pemerintahan desentralisasi. Selain itu, masyarakat kita ini masih mengalami krisis multidimensional, krisis politik, ekonomi, social dan budaya. Krisis yang belum mengalami tanda-tanda perbaikan khususnya di bidang finansial ekonomi belum menunjukkan kestabilannya. Sementara pada sisi lain, tuntutan masyarakat akan terbinanya masyarakat yang demokratis, egaliter dan adil sebagai tersimpul dalam konsep *civil society* atau masyarakat *madani* juga semakin

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷[Rakyat Aceh](#), Jumat, 21 September 2012

mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi 'ulama' dewasa ini semakin berat dan kompleks. Karena itu, penulis ingin berbicara tentang peranan ulama dalam realitas sosio-historis masyarakat Indonesia (*actual roles*) dan peranan yang seharusnya (*ideal expected roles*) dijalankan ulama dalam proses transformasi social budaya menuju masyarakat madani (*civil society*).

Dalam sejarah kesulthanan, ulama ditarik masuk ke dalam sistem administrasi pemerintah dengan tugas dan tanggung jawab mengurus lembaga keagamaan yang dikenal dengan istilah kepenghuluan ataupun kependidikan. Dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pendidikan kepada masyarakat, ulama memiliki sikap secara independen. Ulama bebas menggeluti jalur akidah dan tasawuf dalam bentuk *al-da'wah wa al-tarbiyah* yakni dakwah dan pendidikan. Ulama ini tidak ada kaitan dengan pemerintah. Sedangkan ulama yang bergerak pada jalur ilmu fiqh yang manifestasinya berbentuk *al-tasyri' wa al-qadha* yakni tata hukum perundangan dan peradilan.

Dalam membina dan membimbing masyarakat, ulama memiliki tugas utama sebagai guru, pengajar dan *mubaligh* untuk menanamkan pemahaman Islam kepada masyarakat. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Islam di daerah-daerah perkampungan dan pelosok. Lembaga yang terbentuk pendidikan Islam tersebut disebut dayah/Pesantren atau Meunasah.

Pada masa kolonial, fungsi ulama tetap berlangsung. Pemerintah kolonial tetap mempertahankan kedudukan dan fungsi ulama dalam melakukan perubahan-perubahan tertentu, membina, membimbing dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada masa colonial Belanda ulama indentik dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran di dayah-dayah,

ulama ini melakukan perjalanan dakwah ke pelosok-pelosok daerah untuk menyebar dan memperkuat kesatuan Islam bagi masyarakat yang sesuai dengan sistem dan adat.

Ulama ini selalu melakukan pengawasan dan mengontrol setiap aktivitas dan kegiatan masyarakat serta pemahaman keislaman. Pada umumnya mereka memiliki fanatisme agama dan tingkat agresivitas yang tinggi sehingga memiliki rasa taat dan patu kepada ajaran Agama yang dianutnya yaitu Islam. Demikian juga memiliki kebencian dan permusuhan yang mendalam terhadap kaum kafir khususnya penjajah Belanda. Dengan kedudukannya sebagai tokoh dan panutan masyarakat, para ulama tersebut dapat secara mudah memobilisasi masyarakat untuk melakukan pemberontakan terhadap penguasa kolonial.

Pada masa lalu, ulama dikenal pula sebagai kaum intelegensia dan elite ilmu agama Islam. Mereka tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan dan menjalankan dakwah ke daerah-daerah tetapi juga menulis ide dan pemikirannya dalam bentuk buku-buku (kitab). Seperti; Hamzah Fansuri, Nuruddin ar-Raniri, Syamsuddin al-Sumatrani, Abdurrauf al-Sinkili dan banyak ulama-ulama lainnya yang berdomisili di Aceh. Perjuangan masyarakat Aceh dalam menantang penjajahan Belanda ditandai dengan syahidnya ulama dan masyarakat, yang kemudian diatui sebagai pahlawan.

Mengenai dunia ekonomi, bercermin pada persoalan masyarakat yang sangat mengharapkan adanya perbaikan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat,⁴⁸ disamping perseorangan maupun kolektif, merupakan bukti sejarah partisipasi ulama dalam bidang produksi dan distribusi, demikian juga partisipasi penting adalah masyarakat sebagai konsumen produsi yang membuat perjalanan ekonomi berjalan sebagai mana mestinya.

⁴⁸Serambi Indonesia, Opini, Kebijakan Ekonomi Berbasis Lokal, oleh: Yudi Wahyudin, M.Si, Kamis, 27 September 2012.

Maka, oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan ekonomi yang didesain berbasis karakteristik lokal, baik karakteristik ekologi, sosial-budaya, ekonomi maupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.⁴⁹ Desain kebijakan ekonomi seoptimal mungkin harus dibangun atas dasar menangkap peluang dan memberdayakan sumber daya yang terdapat di Aceh saat ini.

Demikian juga dalam pengembangan seni dan budaya. Hal ini terbukti sebagai khazanah dalam perkembangan seni dan kebudayaan Aceh yang berciri khas keislaman. Perkembangan arsitektur Islam, bukan hanya arsitektur masjid, akan tetapi juga mewarnai arsitektur dalam tata perkampungan, bahkan pasar.

ORGANISASI DAN PELEMBAGAAN ULAMA ACEH

1. PUSA

Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) didirikan pada tanggal 5 Mei 1939.⁵⁰ Yang didirikan oleh tiga orang tokoh Aceh yang menjadi sesepuh dalam organisasi ini, yaitu Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh, Tgk Haji Chik Djohan Alamsjah (Djohan Alamsjah), Tgk. Muhammad Amin dan Tgk. Ismail Jakub.

Hasil musyawarah para ulama-ulama terpilih lah Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh menjadi pimpinan PUSA. Tgk. Muhammad Daud Beureu'eh (seorang pimpinan Islam terkemuka ini dilahirkan tahun 1903) di Beureu'eh,⁵¹ di daerah Keumangan-Beureunuen (dekat Sigli Kab. Pidie).

Sebagai motif berdirinya PUSA, adalah menggerakkan masyarakat Aceh yang telah

lama di jajah oleh kolonel Belanda sehingga menghapuskan sistem kesultamaan di Aceh Darussalam pada tahun 1903, yang telah dipimpin oleh sulthan Muhammad Daud Syah sebagai sulthan yang terakhir.⁵² Maka, maksud dan tujuan mendirikan PUSA, menurut Teungku Ismail Ya`kub,⁵³ antara lain:

1. Untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar Islam yang suci di Serambi Mekkah, yang sudah lama terbenam dalam sebuah kejahatan dan kegelapan.
2. Mempersatukan persepsi dan paham ulama-ulama Aceh dalam menerangkan hukum-hukum yang mungkin sudah jauh berbeda.
3. Memperbaiki dan mempersatukan rencana pelajaran sekolah-sekolah Agama di seluruh tanah Aceh.

PUSA adalah satu-satunya gerakan nasionalis yang dangat berarti di Aceh yang Islami, sehingga PUSA menjadi wahana dalam perjuangan Aceh dari belenggu penjajah dan juga menghadapi kaum tradisional (kepala wilayah atau Ulee Balang). Setelah perang dunia ke dua, ulama memberi pukulan yang menentu terhadap lawan-lawan mereka, terutama para pendiri dan anggota-anggota terkemuka PUSA. Mereka sangat berperan penting dalam mengambil alih menjalankan pemerintahan Aceh. Termasuk Tgk. Amir Husin al Mujahid (Amir Husin al Mujahid) dan Tgk Husin Husuf, masing-masing dalam anggora PUSA adalah sebagai ketua dan sekretaris Pemuda PUSA. Selain itu, Tgk. Islamil Yacub, Tgk Muhammad Nur el Ibrahim (menentu Daud Beureu'eh) dan Tgk. Sayid

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Carnelis van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, terjemahan: *Pemberontakan Darul Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1995), Cet. IV, hlm.256. Muhammad Rizal, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949*, *Skripsi, Prodi Ilmu Sejarah*, FIB-UI Jakarta 2008).

⁵¹Carnelis van Dijk, *Rebellion Under ...*, hlm.256.

⁵²Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh tahun 1945-1949*, (Jakarta: UI Press, 1999), hlm.2. Lihat Juga: Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hlm.16.

⁵³Ismuha, *Ulama dalam Persepsi Sejarah*, (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1976), hlm.1. Lihat Juga: Muhammad Rizal, *Persatuan Ulama ...*

Abubakar. Ketiganya guru pada perguruan Normal Islam, sekolah pendidikan Guru yang didirikan oleh PUSA.⁵⁴ Para Ulee Balang yang ingin menentang Belanda, dianjurkan untuk bergabung dalam organisasi PUSA ini.

Sebuah organisasi dan gerakan anti penjajah yang bersifat modern, PUSA mempertahankan "sifat ke-Acehan Murni", dan kerangka acuan adalah Aceh, bukan Indonesia.⁵⁵

Pada tahun 1942, PUSA melakukan hubungan persekutuan dengan Jepang untuk melawan Belanda melalui perantara orang-orang Aceh yang berdiam di Malaya melakukan hubungan dengan Jepang dalam menyusun program untuk melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Hal ini menjelang pendaratan Jepang di Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, PUSA berupaya dalam berbagai hal untuk bergabung dengan DI/TII dalam memperjuangkan sebuah Negara Islam Indonesia yang dipelopori langsung oleh Daud Beureu'eh.

2. PERTI

PERTI adalah merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan amal sosial. Organisasi ini didirikan oleh syeikh Sulaiman al Rasuli bersama tokoh-tokoh dan ulama-lama yang beritqad ahlisunnah wal jamaah lainnya di Minangkabau sumatra Barat, pada tanggal 15 Zulqaidah 1346 H betepatan pada tanggal 5 Mei 1928.⁵⁶ Lahirnya PARTI didasari oleh semangat kebangsaan dan kesadaran beragama awal-awal abad ke-20, demikian juga menyulus dengan kelahiran berbagai organisasi Islam lainnya seperti Sarikat Dagang Islam (SDI) (1905), Budi Utomo (1908), Sarikat Islam (1911) Muhammadiyah 1912 dan Nahdhatul Ulama (1926).⁵⁷

Datangnya PERTI ke Aceh di bawa oleh Syekh Muda Wali al Khalidi pada tahun 40-an. Kedatangan PERTI di Aceh disambut baik oleh ulama dan masyarakat Aceh khususnya yang beritqad Ahli Sunnah wal Jama'ah. Teungku Syekh Muda Wali al Khalidy tokoh pertama yang memperkenalkan PERTI di Aceh sepulangnya dari menuntut ilmu di Minangkabau. Pertama sekali membentuk PERTI sebagai pusatnya di Aceh adalah di Labuhan Haji Aceh Selatan, sebagai pusat langsung yang berkedudukan di Bukit Tinggi.

Pada tahun 1945 keluar sebuah maklumat Pemerintah RI tanggal 3 November 1945, menganjurkan organisasi masyarakat ini menjadi sebuah organisasi Politik, maka pada tgl. 22 November 1945 resmi menjadi PARPOL. Dengan PERTI dijadikan PARPOL, maka dalam pemilu pertam tahun 1955, PERTI ikut serta dan mendapatkan suara sebanyak 465.359 suara (1,23 %) dari total suara, dan memperoleh 7 kursi dari 260 kursi DPRRI dan 520 anggota Konstituante, ditambah dengan 14 kursi golongan minoritar. Dari 7 kursi tersebut, maka 1 (satu) kursi diberikan jatah untuk PERTI Aceh yang diwakili oleh Tgk.H. Hasan Krueng Kalee.⁵⁸

Di tengah-tengah perdebatan mengenai kemerdekaan RI dan bentuk negara RI sah atau tidak serta legalitas presiden RI Soekarno sebagai uli al amr dan wajib ditaati dalam konstituante. Maka pada tanggal 14 Oktober 1957, presiden Soekarno mengundang sekitar 500 orang ulamadari seluruh pulau Jawa dan sekitarnya, diantaranya 2 (dua) orang dari Aceh yaitu Tgk.H.Hasan Krueng Kalee dan Abuya Muda Wali Al Khalidy ke Cipanas,⁵⁹ yang membicarakan satus negara dan legalitas presiden Soekarno. Maka dalam pertemuan terakhir, menyimpulkan sesuai dengan apa yang

⁵⁴Carnelis van Dijk, *Rebellion Under ...*, hlm. 256-257.

⁵⁵*Ibid.*, hlm.257.

⁵⁶Mutiara Fahmi Razali, PERTI dan Syeikh Wahbah Al-Zuhaily, *theatjehpost* [at] gmail. com. Rabu, 30 Mei 2012 08:00 WIB

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Mutiara Fahmi Razali, *theatjehpost*...

⁵⁹*Ibid.*

dikemukakan oleh ulama Aceh Abuya Muda Wali⁶⁰ bahwa. 1). Kemerdekaan Indonesia adalah sah. 2). Presiden RI Soekarno adalah presiden yang sah dalam posisi *uli al amri dharuri bi al syaukah*.⁶¹

Pada tahun 1973, PERTI beserta tiga partai lainnya (NU, Parmusi, PSII) dileburkan menjadi satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Maka sejak kembalinya ke khittahnya, PERTI terus berkembang sebagai organisasi masyarakat dalam mengembangkan Tarbiyah Islamiyah di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti dayah-dayah atau pondok-pondok di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, kecenderungan politik PERTI sangat kental, terutama dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam sekarang seperti penerapan syariat Islam di Aceh. walaupun perjalanan syariat Islam belum berjalan secara signifikan.⁶² Sebagai faktor utama menurut PERTI adalah belum terwujudnya rujukan standar yang baku di Aceh. maka oleh karena itu PERTI telah bermotivasi dalam melakukan terobosan-terobosan yang dapat memacu lahir sebuah rujukan yang baku dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang berlandaskan Fiqah Ali Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Imam Syafi'i sebagaimana umumnya yang dianut oleh masyarakat Aceh.

3. Inshafuddin

Inshafuddin adalah sebuah organisasi yang terbentuk dalam Persatuan Dayah Inshafuddin. Organisasi ini merupakan organisasi ulama secara kemasyarakatan yang keanggotaannya terdiri dari seluruh ulama sekaligus para pimpinan Dayah yang ada di

Provinsi Aceh. Organisasi ini berdiri sejak 4 Februari 1968 di Seulimeum Kabupaten Aceh Besar,⁶³ dengan tujuan utamanya untuk membina dan mengembangkan dayah sebagai wadah yang menghimpun seluruh potensi umat dan menampung semua aspirasi yang muncul dan berkembang ditengah-tengah kehidupan mereka.

Sebagai suatu organisasi, Inshafuddin mempunyai misi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Ini ditandai dengan kemampuannya dalam menyatukan persepsi para ulama terutama menyangkut dengan sikap dan derap langkah dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul, baik dalam skop kedaerahan maupun berskala nasional. Bahkan Inshafuddin telah mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam rangka menciptakan tatanan ketahanan dan keamanan di Aceh.

Sejarah Islam di Aceh telah ditunjukkan kepada kita bahwa ulama-ulama dayah di Aceh telah dipercayakan di berbagai bidang mulai dari sebagai teungku di dayah untuk mengajar dan memimpin dayah, tenaga skill untuk bidang-bidang pertanian dan kelautan, sebagai penasihat raja-raja sampai pada jabatan sultan sendiri dan para militer yang menjaga keamanan negara. Demikian juga pada masa peperangan melawan Belanda, teungku-teungku dayah telah tampil sebagai pemimpin dan panglima perang untuk mempertahankan Negara dari jajahan kaum kafir. Di awal masa kemerdekaan Indonesia dimana Aceh juga bergabung dengan Indonesia, sejumlah ulama masih dipercaya sebagai pemimpin-pemimpin bangsa baik sebagai pemimpin

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Yang dimaksud dengan *uli al amri dharuri bi al syaukah* adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk sementara waktu (masa transisi), hingga terbentuknya pemerintahan yang sah dan benar. Pengakuan posisi Soekarno tersebut, pada hakikatnya sebagai jawaban sebagai wali nikah bagi para wanita yang tidak memiliki wali. Maka dalam

pandangan Islam sulthan atau pemimpin Negara yang diwakili oleh para hakim di mahkamah syaria adalah wali waifa yang tidak memiliki wali. Lihat: *Ibid.*

⁶²*Ibid.*

⁶³[Dayah inshafuddin. files.wolpresd.com/2011/08/sk-pc-acehutama.jpi](https://files.wolpresd.com/2011/08/sk-pc-acehutama.jpi)

kemasyarakatan, teknokrat-teknokrat sampai pada gubernur dan gubernur militer. Demikianlah kita lihat ulama selalu saja tampil dengan berbagai posisi dalam rangka mengayomi masyarakat.

Masa Indonesia merdeka, Aceh juga telah melewati beberapa masa pergolakan, mulai dari pemberontakan tahun 1946, peristiwa DI/TII 1953, pemberontakan PKI 1965, Gerakan Aceh Merdeka 1976-2005, masa reformasi dan masa transisi. Peristiwa itu semua seharusnya telah dapat dijadikan sebagai pondasi oleh para ulama beserta komponen masyarakat lainnya dalam rangka menata ulang kehidupan bangsa di masa mendatang.

4. HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh)

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) adalah merupakan sebuah organisasi daam mempersatukan persepsi ulama-ulama dayah. Organisasi ini didirikan pada Tanggal 4 Jumadil Akhir 1420 H, bertepatan dengan Tanggal 14 September 1999 M, di Maqam Syiah Kuala Banda Aceh. daras orhgani sasi ini adalah "al ulama warasatul ambia". Maka dalam dasar al ulama waratsat al anbiya adalah dapat terbentuk dengan konsep din al Islam dalam mengembangkan kependidikan di dayah, ssehingga din al Islam menjadi azas dalam pembinaan adat, budaya dan karakter masyarakat Aceh. maka dengan pembinaan religius berkesinambungan, terbentuklah masyarakat Aceh yang jujur, adil, ikhlas dan berani dalam menegakkan kebenaran dan mengusir penjajahan dan penindasan.

Azasnya adalah Islam⁶⁴ dan Aqidah Aqidah Himpunan Ulama Dayah Aceh Menganut I`Tiqad Ahlus Sunnah Waljama`ah /Sunni dan bermazhab dengan Mazhab Syafi`i dan mazhab-mazhab lainnya dengan tidak melakukan talfiq antar mazhab tersebut.⁶⁵

Tujuannya Memperkokoh silaturrahmi antar ulama Aceh dalam rangka membina/membentuk ummat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam melalui pengembangan kegiatan-kegiatan yang Islami.⁶⁶

HUDA merupakan organisasi yang bersifat Independen dan tidak berafiliasi dengan organisasi sosial politik manapun, akan tetapi hanya berpihak kepada kebenaran,⁶⁷ Organisasi HUDA ini hanyalah berbentuk organisasi kemasyarakatan,⁶⁸ yang berfungsi sebagai berikut:

- Sebagai wadah silaturrahmi dan penyalur aspirasi ulama Aceh.
- Sebagai wadah pengembangan Ulama Aceh dalam mewujudkan tujuannya
- Sebagai sarana media komunikasi Ulama dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.⁶⁹

Peran HUDA dalam masyarakat untuk perjuangan menegakkan amar ma`ruf nahi mungkar dan tegaknya syari`at Islam secara kaffah di Aceh,⁷⁰ yang beranggotakan menjadi pengususnya adalah dua kategori, yaitu

- Anggota Biasa ialah para Ulama Aceh yang masih aktif dalam Dayah.
- Anggota Luar Biasa ialah para ulama Aceh yang tidak aktif lagi dalam Dayah.
- Pasal Anggota Kehormatan ialah orang-orang berjasa kepada HUDA yang ditetapkan oleh Pengurus HUDA

5 MUNA

Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) lahir pada bulan Desember 2008. Organisasi ini dijadikan sebagai sebuah lembaga dalam tatanan Permusyawaratan Ulama. MUNA dibentuk dan didirikan para ulama Aceh yang tergabung dalam perjuangan Aceh Merdeka, maka organusasi / Lembaga ini disahkan/dilantik oleh Perdana Menteri Aceh Malik Mahmud, yang diketuai oleh sesepuh

⁶⁴Ibid., Pasal 5

⁶⁵Ibid., Pasal 6

⁶⁶Ibid., Pasal 7

⁶⁷Ibid., Pasal 8

⁶⁸Ibid., Pasal 9

⁶⁹Ibid., Pasal 10

⁷⁰Ibid., Pasal 11

ulama Aceh yaitu Prof.Dr.Muhibuddin Wali.Organisasi ini berpusat di Banda Aceh diberi nama Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA).

Visi MUNA ini dibentuk untuk mempersatukan dan memperkuat Ulama-Ulama dayah/pesantren yang ada di Aceh untuk dapat bekerja sama dengan para Ulama dari luar negeri, sehingga Ulama Partai Agama Islam Semalaya (PAS) telah mengikat hubungan bilateral dengan MUNA ini agar kedudukan dan tercapai tujuannya. Demikian juga MUNA ini telah dikunjungi oleh beberapa Ulama dari negara Asean lainnya seperti Brunai Darussalam dan Thailan (Fatani).

Missi pembentukan MUNA ini untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat bai secara finansial maupun moril. MUNA menginginkan untuk mengembalikan hukum Islam sebagaimana sedia kala dimana hukum Islam ini telah berjalan sesuai dengan adat yang bersumber kepada Alquran dan Hadis. Hal ini diupayakan akan kembalinya kedaulatan secara adil dan makmur di tanah serambi mekkah.

Pada hakikatnya kelahiran MUNA ini, merupakan anjang dalam mengembalikan Kedaulatan Aceh sebagai mana yang telah lampau dulu. Aceh memiliki kekuatan di mata internasional, kini, MUNA telah mengembang sayapnya keseluruh pelosok Aceh sampai ke tingkat desa.

Namun demikian, kelahiran MUNA ini, menurut sebahagian anggota MPU menganggap sebagai lembaga yang menandingi MPU yang telak dibentuk oleh Pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam. Mereka menyatakan bahwa MUNA ini dibentuk secara diam-diam dengan memperoleh dukungan dari Komite Peralihan Aceh (KPA). Akan tetapi tidak, bahkan MUNA ini telah terlebih dahulu dipublikasikan, baik kepada Pemerintah Aceh maupun masyarakat.

Organisasi-organisasi tersebut memiliki penguasaan dan pengawasan oleh sesepuhnya, jangan sampai organisasi-organisasi ini, para ulama khususnya jangan sampai terjebak dalam

perbedaan, minta Wagub Muhammad Nazar dalam pidatonya acara penutupan Mukktamar VII Pengurus Besar Persautuan Dayah Inshafuddin.

Meski berbeda organisasi namun ulama memiliki kekuatan dalam membimbing umat ke arah yang lebih baik. Namun, potensi perbedaan organisasi ulama itu cukup besar, apabila dikelola dengan baik dan dapat maksimal demi menjadi sebuah kontribusi positif bagi pengembangan sistem pendidikan dan pembinaan ummat dalam wadah keislaman bagi masyarakat Aceh.

Disamping itu, Pemerintah Aceh tetap terus berupaya untuk melakukan penguatan terhadap lembaga dan kurikulum dayah (pondok pesantren), sehingga saat ini lembaga pendidikan agama Islam itu di bawah naungan pengawasn Badan Dayah di Aceh.

Organisasi lain yang berperan di Aceh adalah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama yang merupakan organisasi keulamaan yang berasal bukan dari Aceh. Muamadiyah sudah masuk sebelum PUSA berdiri yang berperan sebagai organisasi politik, dan tidak semata-mata sebagai organisasi keagamaan dan kependidikan. Karena itulah Muammadiyah itu tidak berakar dalam masyarakat Aceh, namunhanya terkenal sebagai organisasi pembaharu yang dalam keputusan-keputusannya tentang agama sering dilakukan dengan jalan Ijtihad ketimbang Taklid.Sikap ini pun nampak tercermin dalam keberagaman warga dan simpatisannya.

Nahdhatul Ulama lahir di Surabaya pada abad 20 (31 Januari 1926) karena gejolak politik timur tengah yang sebuah gerakan revolusi modernisasi. Munculnya tokoh-tokoh yang menganut ajaran Wahabi di nusantara. Bermotifkan hal ini maka para ulama mempersatukan persepsi dengan menganut *Ahli Sunnah wa al Jamaah*. Maka berdirilah sebuah gerakan organasasi untuk memperkuat persepsi

dalam berdimensi edialogis kultural,⁷¹ yang memegang kepada empat mazhab Ahli sunnah wa al jamaah yaitu Mazhab Hanafi, maliki, Syafi'i dan Hambali.

PENUTUP

1. Dayah sebagai lembaga pendidikan formal sebagai pendidikan tinggi yang menciptakan kader ulama yang sangat berkompeten dalam pembangunan pola fikir masyarakat
2. Ulama adalah sebagai tokoh sentral dan menjadi panutan dan wajib dipatuhi apa yang telah disyiarkan dalam pemngembangan keilmuan dalm kemasyarakatan
3. Ulama dan dayah tidak dapat dipisahkan yang memiliki satu kesatuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi masyarakat Aceh maupun seluruh nusantara.
4. Demikian makalah ini semoga bemeenfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Hasjmy, 1978, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Jakarta: Bulan Bintang.
- [2] -----, 1993, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al Ma`arif.
- [3] Azzumardi Azra, 1994, *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII : melacak akar-akar pembaruan pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan.
- [4] Badruddin Hsubky, 1995, *Delima Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press.
- [5] Baihaqi A.K., 1983., "Ulama dan Madrasah Aceh", dalam Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rajawali.
- [6] Cernelis van Dijk, 1995., *Rebellion Under the Banner of Islam (The Darul Islam in Indonesia)*, terjemahan: *Pemberontakan Darul Islam*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- [7] Darmawijaya, 2007, *Nikmatnya Tashawuf: mengupas Kisah Sukses Ulama Tashawuf dalam Islamisasi Nusantara*, Makasar: Pustaka Refleksi.
- [8] -----, 2010, *Kesultanan Islam di Nusantara*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- [9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- [10] Fairus M. Nur Ibrahim, (ed.), 2002, *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD.
- [11] Harun Nasutionn dkk, 2002, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan.
- [12] Ibrahim Alfian, 1987, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [13] Inayatillah, 2010, Peran Perguruan Tinggi Islam Pasca Penerapan Syariat Islam Di Aceh, dalam *The Role of Islamic Higher Learning Institution in Building Civil Society*, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa-Aceh.
- [14] Ismail Abi Fida, t.th, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bairut: Dar Al Fikri, t.th.
- [15] Ismuha, 1976, *Ulama dalam Persepsi Sejarah*, Jakarta: LEKNAS-LIPI.
- [16] Laode Ida, 1996, *Anantomi Konfik NU, Elit Islam dan Negara*, Jakarta: Putaka Sunar harapan.
- [17] M. Hasbi Amiruddin, 1994, *The Response of The 'Ulama' Dayah to The Modernization of Islamic Law in Aceh*, *Disertasi Master*: Institute of

⁷¹Laode Ida, *Anantomi Konfik NU, Elit Islam dan Negara*, (Jakarta: Putaka Sunar harapan, 1996), Cet.1, hlm.1

- Islamic Studies McGill University Montreal.
- [18] Misnawati, 2011, *Pengaruh Manajemen Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh Timur terhadap Pendidikan Masyarakat*, dalam *Dinamika Studi Keislaman: Konseptualisasi dan Aktualisasi Islam dalam Pelataran Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*, Langsa: STAIN Zawiyah Cot kala Langsa.
- [19] Muhamad Iqbal, 2009, *Hukum Islam Indonesia Modern: Dinamika Pemikiran Dar Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia*, (Tenggerang : Gaya Media Pratama.
- [20] Muhammad Rizal, 2008, *Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949*, *Skripsi, Prodi Ilmu Sejarah*, FIB-UI Jakarta.
- [21] Munzirin dkk, 2009, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pinus.
- [22] Musyrifah Sunanto, 2005, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta Rajawali Press.
- [23] Mutiara Fahmi Razali, 30 Mei 2012, PERTI dan Syekh Wahbah Al-Zuhaily, *theatjehpost [at] gmail. com*.
- [24] Nazaruddin Syamsuddin, 1999, *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh tahun 1945-1949*, Jakarta: UI Press.
- [25] Saifuddin Zuhri, 1981, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al Ma`arif.
- [26] *Serambi Indonesia*, Kamis, 27 September 2012., Opini, Kebijakan Ekonomi Berbasis Lokal, oleh: Yudi Wahyudin, M.Si,
- [27] Shabri, et al., 2005, *Kedudukan dan Peran Dayah di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi NAD, 2005,
- [28] Sri Mulyati, 2006, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Kencana.
- [29] Syamsul Rizal dkk, 2008, *Syariat Islam dan Paradigma Kemanusiaan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Prov NAD.
- [30] Tim Monografi Daerah Istimewa Aceh, 1976, *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [31] *Wacana Pemikiran Santri Dayah*, 2007, (Banda Aceh: BRR Nad-Nias, PKPM Aceh dan Wacana Press,